



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR**  
Jln. Belimbing RT I / RW I Kelurahan Tiakar Telp. ( 0752 ) 93831

**GENDER BUDGET STATEMENT**  
**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

OPD : KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN : 2025

Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Subkegiatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kode Kegiatan	7.01.03.2.02.03
Analisis Situasi	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan ( Data Pilah Gender )</b> Kecamatan Payakumbuh Timur mempunyai 9 Kelurahan. Setiap Kelurahan mempunyai beberapa organisasi kemasyarakatan yaitu LPM, PKK, RT/RW. Kepengurusan LPM didominasi oleh laki-laki, Kepengurusan PKK didominasi oleh Wanita Kepengurusan pada LPM beranggotan 83 orang Perempuan dan 91 orang Laki-laki Kepengurusan pada PKK didominasi oleh perempuan beranggotan 20-25 orang untuk satu kelurahan</p> <p><b>2. Isu dan Faktor kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b> LPM dalam kepengurusannya lebih dominan laki-laki sehingga menimbulkan kesenjangan. PKK dalam Pengurusannya 100% didominasi oleh Perempuan. RT/RW ketuanya didominasi oleh Laki-laki sehingga juga menimbulkan kesenjangan</p> <p><b>b. Faktor Kesenjangan Internal :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LPM : LPM dalam menjalankan kegiatannya sering dilaksanakan pada malam hari sehingga kurang memungkinkan untuk perempuan ikut serta sehingga dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan kepentingan perempuan.</li><li>• PKK : PKK dalam menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan.</li><li>• RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan</li></ul> <p><b>c. Faktor Kesenjangan Eksternal :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan;</li><li>• Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</li></ul>

	▪ Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.
--	--

Rencana Tindak	Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	
		Tujuan	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dengan keterlibatan laki-laki dan perempuan yang proporsional
		Aktifitas	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Sumber dana	Rp. 120.479.900,-		
Dampak / Hasil / Manfaat	<b>Outcomes</b> : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.		

Payakumbuh, Maret 2024  
 CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR



HEPI, S.P  
 NIP. 19830831 201001 1 004



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR**  
Jln. Belimbing RT I / RW I Kelurahan Tiakar Telp. ( 0752 ) 93831

**GENDER BUDGET STATEMENT**  
**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

OPD : KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR  
TAHUN ANGGARAN : 2025

Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Subkegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kode Kegiatan	7.01.02.02.1.01
Analisis Situasi	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan ( Data Pilah Gender )</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki 9 Kelurahan</li><li>• Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan merumuskan usulan yang dimulai dari Tingkat kelurahan dilanjutkan ke Tingkat kecamatan mayoritas dihadiri oleh laki-laki ( 75%) dan Perempuan (25%)</li><li>• Unsur masyarakat yang terlibat : Masyarakat (RT/RW/Faskel), Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)</li><li>• Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 adalah 60 orang Perempuan dan 80 Laki-laki</li><li>• Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kelurahan Tahun 2024 adalah 138 orang Perempuan dan 202 Laki-laki</li><li>• Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.</li></ul> <p><b>2. Isu dan Faktor kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor kesenjangan.</b></p> <p>Dengan keterlibatan mayoritas laki-laki pada kegiatan pelaksanaan musyawarah pembangunan desa tersebut maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Aspek Akses</b> Tidak ada masalah, setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kandung dan diundang.</li><li>▪ <b>Aspek Kontrol / Kewenangan</b> Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan</li></ul>

	<p>dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat Kelurahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Aspek Partisipasi</b> Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.</li> <li>▪ <b>Aspek Manfaat</b> Secara umum dilihat dari pelaksanaan musrenbang bahwa perempuan adalah kelompok minoritas yang berkontribusi didalam usulan musrenbang dan laki-laki sebagai kelompok mayoritas yang berkontribusi lebih banyak dalam usulan pembangunan.</li> </ul> <p><b>b. Faktor Kesenjangan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budaya kerja dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan pengarusutamaan gender dilingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat</li> <li>▪ Masih terbatasnya jumlah perencanaan yang mampu melakukan analisis yang responsive gender</li> </ul> <p><b>c. Faktor Kesenjangan Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai medahulukan perempuan</li> <li>▪ Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</li> <li>▪ Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan.</li> </ul>
--	---

Rencana Tindak	Kegiatan	1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan) yang responsif Gender	
		Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa yang responsif gender
Sumber dana	Rp. 39.999.700,-		
		Panitia	Tim pelaksana musrenbang Kecamatan dan Lurah se-Kecamatan
		Peserta	1. Fasilitator Kelurahan 2. Lurah se-Kecamatan 3. Camat

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua RT se-Kecamatan</li> <li>5. Ketua RW se-Kecamatan</li> <li>6. Admin Kecamatan dan Kelurahan Sistem E-Musrenbang Kecamatan;</li> <li>7. Tokoh Masyarakat;</li> <li>8. SKPD di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh;</li> <li>9. Anggota Dewan Dapil III, Payakumbuh Timur dan Selatan;</li> <li>10. Walikota/ Wakil Walikota Payakumbuh.</li> </ol>
		Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aula Kecamatan</li> <li>▪ DPA Kecamatan Payakumbuh Timur Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa</li> </ul>
		Keluaran (output)	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang yang Responsif Gender
Dampak / Hasil / Manfaat	<p><b>Outcomes</b> : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.</p>		

Payakumbuh, Maret 2024  
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR



HEPI, S.IP

NIP. 19830831 201001 1 004